

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN
PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2013-2021)**

M Saiful Hadi
STIE YKPN

Dheni Indra Kusuma
STIE YKPN

e-mail: dheni@stieykpn.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of Local Own Revenue, and Balancing Funds, with moderation of economic growth on Capital Expenditures. This research was conducted at the regency/city government of Karanganyar, Central Java Province. The sampling technique used was a saturated sample, and there was 1 regency/city of Karanganyar, Central Java province, which was the sample in this study. This research uses APBD Realization reports and GRDP tables for the 2013-2021 period as samples. The analytical method used to test the hypothesis in this research is Moderated Regression Analysis (MRA). The results of this study indicate that Regional Original Income has no effect on Capital Expenditures, and Balancing Funds influence Capital Expenditures. The moderating variable (economic growth) is not able to moderate Regional Original Income on Capital Expenditure and on the Balancing Fund variable.

Keywords: local own revenue, balance fund, capital expenditures, economic growth.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan, dengan moderasi pertumbuhan ekonomi terhadap Belanja Modal. penelitian ini dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota karanganyar provinsi jawa tengah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, dan terdapat 1 kabupaten/kota karanganyar provinsi jawa tengah yang menjadi sampel pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan laporan Realisasi APBD dan tabel PDRB periode 2013-2021 sebagai sampel. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal, Variabel moderasi (pertumbuhan ekonomi) tidak mampu memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dan juga pada variabel Dana Perimbangan.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, pertumbuhan ekonomi

JEL : M41; M42

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi Indonesia sangat diperlukan untuk kemajuan ekonomi negara yang berkelanjutan. Standardisasi dan koherensi dipertahankan sepanjang proses pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing kota, dengan tetap fokus pada tujuan dan sasaran nasional yang ditetapkan melalui perencanaan jangka panjang yang komprehensif (Suliswanto, 2010). Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur anggaran mereka sendiri, dengan beberapa pengawasan dan kontrol dari pemerintah pusat. Aspek khusus dari undang-undang tersebut diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004.

Bagian ini menekankan pada kewenangan luas yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya keuangan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya masing-masing. Sumber daya ini juga disebut sebagai "dana pemerintah daerah" atau "pendapatan pemerintah daerah". Pertumbuhan suatu daerah akan dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan keuangan yang berlaku di sana. Penggunaan strategi manajemen yang efisien dan berhasil akan menghasilkan perluasan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi lokal akan mengakibatkan peningkatan jumlah uang yang dikumpulkan oleh pemerintah dalam bentuk pajak, royalti, dan jenis pungutan dan pungutan lainnya sebagai hasil dari pengembangan operasi ekonomi.

Belanja modal merupakan salah satu jenis alokasi sumber daya yang harus dilakukan secara efisien dan efektif agar belanja daerah dapat menjadi indikasi pembangunan ekonomi (Permendagri No.25 Tahun 2009). Pengeluaran investasi meliputi pengeluaran langsung dan tidak langsung. Untuk mencapai tujuan perluasan stok aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan kas ke APBD dalam bentuk anggaran belanja modal. Sebagian besar kesulitan yang mengganggu entitas sektor publik, termasuk pemerintah daerah, terkait dengan distribusi sumber daya keuangan. Seluruh jumlah uang yang telah dialokasikan untuk digunakan pada proyek-proyek tertentu disebut sebagai alokasi anggaran. Mengingat sifat sumber pendapatan pemerintah daerah yang terbatas, sangat penting bahwa organisasi dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya agar dapat mendukung peningkatan infrastruktur yang efisien. Yang dimaksud dengan "belanja daerah" yang secara harfiah diterjemahkan menjadi "kekayaan daerah" adalah keuangan daerah yang didistribusikan secara jujur dan merata sehingga semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkannya tanpa dirugikan (Kawedar dkk, 2008).

Akan tetapi, pemerintah daerah dalam pengalokasian pendapatan daerah cenderung menggunakan untuk keperluan belanja rutin dari pada belanja modal. Untuk membiayai pengeluaran tersebut maka dibutuhkan sumber pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Dalam halnya strategi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan desentralisasi sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan telah terlihat dengan jelas dan menggunakan kenaikan dana transfer dari tahun ke tahun. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwiranda (2014) menemukan bukti empiris bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berbeda dengan penelitian Wandira (2013) menunjukkan bahwa tidak terdapatnya pengaruh PAD terhadap belanja modal.

PAD menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang nomor 33 tahun 2004, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Peran Pendapatan Asli Daerah menurut pasal 5 ayat (1) UU No 33/ 2004 memberikan cakupan sumber PAD yang luas mulai dari pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dalam hal ini pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang diterima. Sehingga pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka pemerintah daerah harus berusaha keras untuk mewujudkan Pendapatan Asli Daerah yang sebesar-besarnya.

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional didaerahnya masing-masing, hal ini dapat menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut pemerintah pusat memberikan dana perimbangan untuk masing-masing daerah. Adapun jenis dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dengan menggunakan sebagai pemberian layanan lebih baik kepada masyarakat umum.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008) dan Wulandari dkk (2013) dan Supadmi (2014) menemukan bukti empiris Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) menemukan bukti empiris bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Sedangkan penelitian dari Hadiati (2013) menemukan hasil bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dalam kondisi demikian disebabkan adanya dana perimbangan yang diterima oleh daerah hanya di peruntukan untuk membiayai pengeluaran rutin, seperti untuk belanja pegawai dan hanya sedikit digunakan untuk belanja modal.

Laju pertumbuhan ekonomi sebagai parameter dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor ekonomi dalam suatu perekonomian (Hasan 2012). Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kondisi kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan produksi barang dan jasa bertambah sehingga terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat. Salah satu dari tujuan pemerintah daerah adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahunnya. Dalam hal ini dimasukkan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderat. Menurut Sekaran (2013) Variabel pemoderat adalah variabel yang mempunyai dampak kontinjensi (*contingent effect*) yang kuat pada hubungan variabel independen dan dependen.

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan PAD dan Dana Perimbangan terhadap belanja modal. Selain itu pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduknya, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Menurut Abayomi & Taiwo (2011), terdapat bahwa pertumbuhan ekonomi berhubungan positif dengan belanja modal. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka juga dapat meningkatkan belanja modal suatu daerah. Berdasarkan dari uraian diatas peneliti mengambil judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris

pada Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021).

2. TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam penelitian ini menggunakan teori kontijensi, teori pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, pertumbuhan ekonomi. Keterkaitan mengenai teori di atas dengan permasalahan akan dijelaskan dibawah ini sebagai berikut.

2.1 Teori Kontijensi

Teori kontinjensi Pembahasan tentang sebab-sebab mengapa pemungutan pendapatan merupakan suatu bentuk pendapatan tertentu yang meliputi pajak negara, pembayaran negara, pendapatan yang diperoleh melalui pengelolaan sumber daya negara yang baik, dan seterusnya dimasukkan dalam konteks deskriptif. Agar pemerintah daerah dapat melaksanakan otonomi daerah dengan memanfaatkan potensi desentralisasi secara maksimal, tujuan PAD adalah untuk memberikan kekuasaan yang mereka butuhkan untuk melakukannya.

2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Sebuah konsep yang bertujuan untuk menentukan pertumbuhan ekonomi pada jangka waktu yang panjang serta dapat menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Teori ini dapat mendeskripsikan bagaimana faktor berinteraksi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Sukirno (2011:335), ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi pemerintahan. Salah satu teori yang populer adalah Teori Schumpeter.

Teori Schumpeter merupakan teori yang dikemukakan pada tahun 1943 dan diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul *the theory of economic development*. Selanjutnya Schumpeter menggambarkan teorinya tentang proses pembangunan dan faktor utama yang menentukan pembangunan dalam bukunya *Business Cycle*. Menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah proses inovasi yang dilakukan oleh inovator atau wiraswasta (*entrepreneur*).

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 Pasal 1 ayat 18, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD sebagai sumber pendapatan mengharuskan pemerintah daerah untuk memaksimalkannya. Untuk itu, Pasal 5 ayat (1) UU/33 yang memberikan cakupan sumber PAD yang luas mulai dari pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Suhanda (2007:156) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Sedangkan menurut Halim (2007:96) pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah.

2.4 Dana Perimbangan

Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan pemberian dana perimbangan adalah agar

daerah bisa mencukupi kebutuhan aktivitas dan program desentralisasi di daerah.

2.5 Belanja Modal

Belanja modal adalah adalah suatu pengeluaran ataupun pembiayaan yang dibutuhkan untuk bisa membentuk modal dengan cara mengadakan, membeli, ataupun membangun suatu aset yang mempunyai nilai lebih dari satu tahun periode akuntansi. Menurut Halim (2008:101), belanja modal adalah alokasi dana untuk perolehan pendapatan tetap dan aktiva lain yang memberikan manfaat selama lebih dari satu periode akuntansi.

Menurut Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi, belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran dana untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset pemerintah, termasuk aset yang ditambatkan, memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilai substansial yang sebanding dengan aset lainnya.

2.6 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bagian indikator yang menentukan berhasilnya pembangunan dalam suatu perekonomian sebuah daerah maupun negara. Kemajuan suatu perekonomian dapat ditentukan oleh besarnya pertumbuhan output nasional. Menurut Rahardjo, (2013). Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produksi Domestik Bruto (PDB) maupun menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu daerah maupun negara.

Untuk mengungkapkannya dalam istilah yang paling sederhana, pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan sebagai peningkatan kemampuan ekonomi untuk menghasilkan produk dan jasa. Saat menganalisis pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, salah satu indikator terpenting yang harus diperhatikan adalah laju ekspansi ekonomi.

Pengembangan Hipotesis

Keterkaitan PAD, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan

Menurut Mardiasmo (2001:132) PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga mampu menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah sehingga sumber PAD terutama yang berasal dari pajak daerah akan meningkat. Dari penelitian Pratama (2016) menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan penelitian Dulmuid (2012) memperoleh hasil bahwa PAD dan dana alokasi umum secara bersamaan berpengaruh positif terhadap belanja modal. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto (2007) memperoleh hasil bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: PAD Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal

Dana perimbangan merupakan alokasi dana yang berasal dari pemasukkan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Menurut Rachmawati (2015) yang menunjukkan bahwa

adanya hubungan antara dana perimbangan terhadap belanja yang berpengaruh secara positif. Sebaliknya, menurut Amalia (2010) yang menunjukkan bahwa dana perimbangan juga berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada publik yaitu masyarakat yang direalisasikan dengan melalui belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Dana Perimbangan Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal

Menurut penelitian Masruroh (2018) berkesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh PAD terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi merupakan dari salah satu tujuan suatu proses pembangunan yang sedang berjalan. Pertumbuhan ekonomi yang memadai untuk memperlancar kegiatan ekonomi. Begitu juga dengan Supadmi (2012) membuktikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh PAD terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Tingkatan pertumbuhan ekonomi diduga juga dapat memperkuat atau memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi PAD Terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat ekonomi yang dialami suatu negara yang bergantung pada adanya perkembangan jumlah penduduk. Dengan adanya perkembangan jumlah penduduk, maka hasil dari produksi suatu negara juga tentunya akan meningkat (Adam Smith). Menurut Penelitian yang dilakukan Supadami (2012) menemukan bukti empiris DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan Widasmara (2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi DAU terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan studi yang menggunakan metode kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan dapat menjelaskan hubungan setiap variabel yang ingin diteliti dan didukung dengan teori-teori yang relevan untuk memperkuat analisis peneliti ketika menetapkan kesimpulan penelitian dan hasil penelitian tersebut didapatkan peneliti dari hasil barometer variabel yang akan digunakan. Dalam hal ini menguji PAD dan dana perimbangan, terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Studi kasus penelitian ini dilakukan pada kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dengan periode tahun 2013 sampai tahun 2021.

3.1 Sampel dan Data Penelitian

Purposive sampling digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Pengambilan sampel untuk tujuan penelitian atas dasar kriteria tertentu disebut dengan "purposeful sampling". Berikut ini adalah kriteria yang digunakan untuk memilih sampel untuk penelitian ini:

1. Kabupaten/Kota yang telah mengeluarkan Laporan Realisasi Anggaran Keuangan dan laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

2. Data yang dibutuhkan telah tersedia adalah laporan yang telah terealisasi atau di audit.
3. Jumlah Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan tidak bernilai nol (0) atau minus (-).

Statistik penduduk yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Laporan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Laporan Realisasi Keuangan (LRAK). Kedua laporan ini sama-sama digunakan sebagai indikator ekspansi ekonomi.

Penelitian ini menggunakan data yaitu Laporan Realisasi Anggaran Keuangan yang telah di audit yang diperoleh dari website pemerintah daerah tersebut dan data Pertumbuhan ekonomi di peroleh dari website Badan pusat Statistik. Dimensi waktu yang digunakan adalah *time series* dan penelitian dilakukan secara *Cross Sectional*.

3.2 Variabel Dependen

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan satu variabel dependen yaitu belanja modal. Penjelasan mengenai belanja modal akan dijelaskan sebagai berikut ini.

3.2.1 Belanja Modal

Belanja modal menurut Undang-Undang No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi adalah menyiapkan anggaran untuk pembelian aset tetap dan aset lainnya yang akan memberikan keuntungan dalam jangka waktu yang lama selama lebih dari satu periode akuntansi. Aset permanen, selain bentuk aset lainnya, seperti kepemilikan pemerintah, seringkali memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilai moneter yang dapat diukur. Perhitungan dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut ini:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya.

3.3 Variabel Independen

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua variabel independen yaitu pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana perimbangan. Penjelasan mengenai PAD dan Dana Perimbangan akan dijelaskan sebagai berikut ini.

3.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Suhanda (2007) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Sedangkan menurut Halim (2007) pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Perhitungan dapat dilakukan berdasarkan rumus sebagai berikut ini:

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan + Lain – lain PAD yang SAH.

3.3.2 Dana Perimbangan

Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan pemberian dana perimbangan adalah agar daerah bisa mencukupi kebutuhan aktivitas dan program desentralisasi di daerah. Perhitungan dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut ini:

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Bagi Hasil Pajak} + \text{Bagi Hasil Sumbangan} + \text{DAK} + \text{DAU}$$

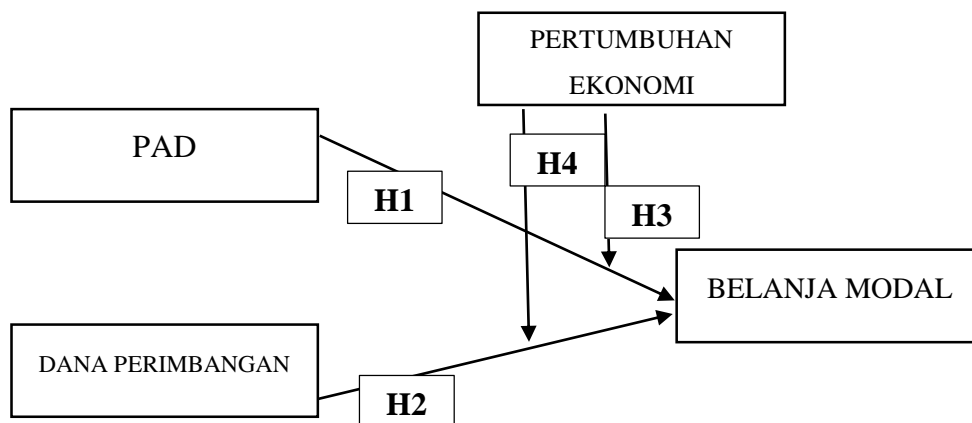
3.4 Variabel Pemoderasi

Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi Menurut Rahardjo (2013). Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan *output*, yang diukur menggunakan Produksi Domestik Bruto (PDB) maupun menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) salam suatu daerah maupun negara. Perhitungan dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}}$$

3.5 Model Penelitian

Gambar 3.1 Model Penelitian



3.6 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, struktur deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2011). Menurut Algifari (2000), staistika deskriptif ini bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran dari suatu data dengan melihat mean, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi agar seluruh data mudah untuk dipahami pembaca.

3.7 Uji Asumsi

Hal pertama yang harus ditentukan dalam penelitian ini adalah apakah data penelitian dapat digunakan untuk pengujian asumsi pendekatan pemodelan regresif dan penerimaan temuan secara ekonometrik. Jika mereka bisa, maka kita bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan meliputi pengujian normalitas, pengujian multikolinearitas, pengujian autokorelasi, dan pengujian heteroskedastisitas.

3.8 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk proses melakukan evaluasi terhadap sampel yang digunakan dan sebagai dasar untuk membuat keputusan di sebuah penelitian. Manfaat dari pengujian ini untuk menguji dampak variabel independen terhadap variabel dependen ketentuan hipotesis diterima ataupun ditolak adalah sebagai berikut: Jika signifikansinya <

5%, maka variabel independen memiliki dampak terhadap variabel dependen (hipotesis diterima). Jika signifikansinya $> 5\%$, maka variabel independen tidak memiliki dampak terhadap variabel dependen (hipotesis ditolak).

3.8.1 Uji F

Uji –F untuk mengidentifikasi secara bersamaan pengaruh faktor independen terhadap faktor dependen. Analisis regresi linier dilakukan pada prosedur penghitungan SPSS, dan hasilnya ditabulasi dan disajikan dalam tabel Anova. Dengan mengecek tabel Anova dengan hasil uji F maka dapat dipastikan nilai tingkat signifikansi yang diuji. Ketika tingkat signifikansi lebih rendah dari Alpha 5%, faktor independen diperbolehkan mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan tanpa dibatasi oleh ambang batas signifikansi. (Ghozali, 2005).

3.8.2 Uji Parsial (Uji t)

Uji-T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya secara parsial. Proses perhitungan menggunakan SPSS melalui analisis regresi linier dan hasilnya dapat dilihat pada tabel *Coefficients*. Dari hasil uji t, maka akan diketahui *level of significant* dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari Alpha 5 % maka secara parsial variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikatnya, dan begitu pula sebaliknya (Ghozali, 2005).

3.8.3 Moderated Regression Analysis (MRA)

Pengujian ini bermanfaat untuk mengidentifikasikan variabel pemoderasi mempunyai kemampuan untuk memperkuat atau memperlemah variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Moderated Regression Analysis (MRA) dianalisis dengan melakukan perkalian dua atau lebih variabel independen. Apabila perkalian suatu variabel atau lebih variabel independen tersebut signifikan, dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut memoderasi antara variabel independen dan variabel dependen (Ghozali, 2011:150). Penelitian menggunakan *Moderated Regression Analysis* MRA dengan tingkat signifikan 5%. Apabila t_{hitung} lebih besar t_{tabel} , hipotesis menyatakan bahwa semua variabel pemoderasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja modal dan sebaliknya. Dalam hal ini persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut ini:

$$BM = a + b1P + b2S + b1PUP + b2SUP + e$$

Keterangan:

BM : Variabel Belanja Modal

a : Konstanta

b1, b2 : Koefisien Regresi untuk masing-masing variabel

P : Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

S : Variabel Dana Perimbangan

UP : Variabel Pertumbuhan Ekonomi

e : Nilai Residu

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi jateng.bps.go.id dan <https://karanganyarkab.bps.go.id/> yang kemudian diolah menggunakan SPSS.

4.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai objek sampel. Hal ini dapat digambarkan melalui nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Berikut ini tabel hasil dari pengujian analisis statistik deskriptif.

Tabel 4.1 Hasil Descriptive Statistics

	n	Minimum	Maximum	Mean	Standar deviasi
PAD	9	25,81	26,78	26,4498	0,33253
DP	9	27,53	27,96	27,7973	0,16172
PE	9	9,43	37,18	26,2571	10,53574
BM	9	25,72	26,67	26,1613	0,30955
Valid n (listwise)	9				

Sumber: *Output SPSS, 2022*

Pada tabel 4.1 diatas, berdasarkan hasil statistik deskriptif dapat dilihat pengolahan data menghasilkan nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi atas variable penelitian yang digunakan dari laporan tahun 2013 hingga pada tahun 2021 sebagai berikut: Variabel PAD memiliki nilai minimum sebesar 25,81, nilai maksimum sebesar 26,78, nilai rata-rata sebesar 26,4498, dan nilai standar deviasi sebesar 0,33253. variabel Dana Perimbangan memiliki nilai minimum sebesar 27,53, nilai maksimum sebesar 27,96, nilai rata-rata 27,7973, dan memiliki standar deviasi 0,16172. Variabel Pertumbuhan Ekonomi nilai minimum sebesar 9,43, nilai maksimum sebesar 37,18, dan nilai rata-rata 26,2571, dan memiliki standar deviasi sebesar 10,53574. Variabel Belanja Modal memiliki nilai minimum sebesar 25,72, nilai maksimum sebesar 26,627, nilai rata-rata belanja modal sebesar 26,1613, dan nilai standar deviasi sebesar 0,30955.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik adalah analisis yang digunakan untuk menilai apakah dalam medel regresi terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Pada penelitian berikut, peneliti menggunakan uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Dengan tingkat singnifikansi 5%.

Uji Normalitas berdasarkan hasil penelitian, maka nilai *Asymp. Sig* PAD, DP, PE, dan BM adalah 0,706 lebih besar dari pada sig, ($\alpha=0,05$), Hal ini dapat dikatakan terdistribusi normal karena *Asymp. Sig* variabel bebas dan variabel terikat besar dari pada taraf signifikan. Uji Multikolinearitas berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa besarnya nilai *tolerance* ≥ 10 dan nilai *VIF* ≤ 10 , maka semua kriteria telah memenuhi, sehingga hasil dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan. Uji Heteroskedastisitas berdasarkan hasil penelitian, tingkat

signifikansi PAD (0,935), DP (0,012), dan PE (0,180) di atas 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji Autokorelasi Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi memperoleh hasil DW sebesar 1,899 dan berdasarkan interval nilai statistik *Durbin Waston*, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif pada model regresi penelitian ini. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *Durbin Waston* 1,899 berada dalam interval $-2 < 1,899 < 2$.

4.3 Uji F

Uji F (silmutan) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Variabel independen dikatakan berpengaruh terhadap variabel dependen ketika nilai signifikansi < 0.05 .

Tabel 4.2 Hasil Uji F

Model	F	Signifikansi
Regression	5,174	0.049
Residual		
Total		

- Predictors: (Constant), PAD, DP
- Dependent Variabel: BM

Sumber: *Output SPSS, 2022*

Berdasarkan hasil uji F diatas dengan nilai signifikansi $0,049 < 0.05$, maka dapat dikatakan bahwa variabel PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap variabel Belanja Modal.

4.4 Uji T

Uji t ataupun uji parsial digunakan untuk mengukur setiap variabel independen dengan variabel dependen. Apabila nilai signifikansi < 0.05 dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka secara parsial variabel independen memiliki hubungan dengan yang signifikan dengan variabel dependen.

4.4.1 Uji PAD berpengaruh terhadap belanja modal

Tabel 4.3 Uji Parsial (Uji t)

Hipotesis	t_{hitung}	Signifikansi	Keterangan
PAD	-2,151	0,075	H1- ditolak

Sumber: *Output SPSS, 2022*

Berdasarkan hasil dari tabel diatas, PAD memiliki nilai t-hitung senilai -2.151 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,075. Hasil dapat disimpulkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan karena PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain, seperti belanja rutin/belanja operasional. Selain itu, tingkat peningkatan dari anggaran belanja modal tergantung pada kondisi dan situasi setiap daerahnya.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yonita (2011) memperoleh hasil bahwa tidak ada pengaruh PAD terhadap Belanja Modal. Nurin (2016) juga

menyatakan bahwa tidak ada pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dan penelitian dari Mahardika dan Riharjo (2019) juga menyatakan tidak ada pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan berbagai referensi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa PAD tidak dapat dijadikan indikator dalam menentukan pengalokasian Belanja Modal.

4.4.2 Uji Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal

Tabel 4.4 Uji Parsial (Uji t)

Hipotesis	t _{hitung}	Signifikansi	Keterangan
DP	3,143	0,020	H2- terdukung

Sumber: *Output SPSS, 2022*

Berdasarkan hasil dari tabel diatas, Dana perimbangan memiliki t-hitung senilai 3.143 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,020. Hasil dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, maka ini berarti H2 diterima.

Hasil pengujian ini sejalan dengan hipotesis yang telah peneliti sebutkan dalam bab 2, hasil ini sepadan dengan penelitian terdahulu Oktra dan pontoh (2013) menyatakan jika DAU berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Dan penelitian dari Mhardika dan Riharjo (2019) menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Kemandirian pada daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan terjadi sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat menjadi lebih meningkat. Peningkatan Belanja Modal yang diharapkan akan memberikan peningkatan infrastruktur dan dapat memberikan pelayanan publik dan penyimbangan keuangan antar masing-masing daerah lebih baik agar tidak terjadi ketimpangan fiskal. Dengan berbagai referensi diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan dapat dijadikan sebagai indikator dalam pengalokasian Belanja Modal.

4.5 Moderat Regression Analysis (MRA)

Dalam penelitian ini menggunakan *Moderat Regression Analisis* (MRA) untuk menganalisis pengaruh variabel moderasi pada hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel moderating adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen hasil pengujian MRA di sajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5 Hasil Uji Moderat Regression Analisis

hipotesis	Standardized	Thitung	Signifikansi
	Beta		
PAD	1,964	1,398	0,235
DP	0,758	0,775	0,482

PAD*PE	-3,827	-1,451	0,220
DP*PE	1,420	0,633	0,561

Sumber: *Output SPSS, 2022*

4.5.1 Uji Pertumbuhan Ekonomi memoderasi PAD terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderating tidak mampu dalam memoderasi hubungan antara PAD dengan Belanja modal pada Kabupaten Karanganyar. Hal ini dapat diketahui dengan nilai uji t-hitung sebesar -1,451 dengan nilai signifikansi 0,220 lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hal ini tidak dapat tergolong dalam kriteria kualisi mederating, dimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi memoderasi PAD terhadap belanja modal pada hasil t-hitung berpengaruh negatif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderating tidak mampu dalam memoderasi hubungan antara PAD terhadap Belanja Modal.

Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah dalam tujuan meningkatkan pembangunan daerah, sehingga pembagunan berbagai sarana dan prasana publik serta infrastruktur dapat meningkatkan PAD, pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijadikan faktor penentu terjadinya pengaruh PAD terhadap alokasi Belanja Modal. Hal ini dikarena pemerintah kabupaten karanganyar dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi masih belum maksimal walaupun meningkatkan sarana dan prasaran serta fasilitas sudah tercapai.

Hasil dari penelitian Sricahyani (2018) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh dan tidak mampu memoderasi PAD tidak terhadap alokasi Belanja Modal. Dan penelitian dari Supadami (2014) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh PAD pada alokasi Belanja Modal. Maka dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh dan tidak mampu memoderasi PAD terhadap Belanja Modal secara signifikan.

4.5.2 Uji Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderating tidak mampu dalam memoderasi hubungan antara Dana Perimbangan dengan Belanja modal pada Kabupaten Karanganyar. Hal ini dapat diketahui dengan nilai uji thitung sebesar 0,633 dengan nilai signifikansi 0,561 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yang merupakan nilai kritis. Hal ini tidak dapat tergolong dalam kriteria kualisi mederating, dimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Dana Perimbangan terhadap belanja modal pada hasil t-hitung tidak berpengaruh signifikan.

Proses Dana Perimbangan yang bersumber dari pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana untuk melakukan pembangunan dan mampu memenuhi belanja modal, karena disebabkan dana perimbangan yang bersumber dari potensi-potensi sumber daya alam dan pajak yang diperoleh daerah untuk membiayai biaya selain belanja modal memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dalam memenuhi pertumbuhan ekonomi

tidak harus dengan meningkatkan sarana dan prasana publik serta infrastruktur. Melalui pembelanjaan daerah selain belanja modal, pertumbuhan ekonomi akan berjalan efektif dan efisien ketika berdiri pada perencanaan pembagunan yang tepat sasaran.

Hasil dari penelitian Sricahyani (2018) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh dan tidak mampu dimoderasi oleh variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap alokasi Belanja Modal. Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpegaruh dan tidak mampu memoderasi Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal secara signifikan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan mengenai PAD dan dana perimbangan terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi, di kabupaten Karanganyar maka penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. PAD tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal
2. Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal
3. Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi PAD terhadap Belanja Modal
4. Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan lebih menambahkan tahun periode dan objek penelitian yang lebih luas lagi dan diharapkan untuk menambahkan variabel yang lain terkait komponen APBD yang belum dibahas pada penelitian ini sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik atau model penelitian yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Siregar, B. Dan B. Siregar. 2001. Akuntansi Pemerintah Dengan Sistem Dan, Edisi Ketiga. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.37.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pengelolaan Belanja Modal Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Dana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Sri Chayaning, Umi Salama. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. Pada Provinsi Jawa Tengah.
- Sukma Ayu, Ikhsan. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi.

- Dewi C, Rosalina, Vekie. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Dikota Bitung.
- Rene Kristianti. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi. (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur).
- Ika, Iin, Wenny. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Dengan Pendapatan Per Kapita Sebagai Variabel Pemoderasi.
- Erdi, Rachmawati. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi.
- Eka, Elsa, Ruth, Dan Benny. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Dana Alokasi Umum Sebagai Variabel Pemoderasi. Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Di Sumatera Utara.
- [BPS] Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah 2020. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Karanganyar 2013-2022. Semarang: Badan Pusat Statistika Jawa Tengah.
- [BPS] Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah 2021. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah 2017-2018. Semarang: Badan Pusat Statistika Jawa Tengah.
- [BPS] Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah 2022. Produk Domestik Bruto Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2022. Semarang: Badan Pusat Statistika Jawa Tengah.
- [BKD] Badan Keuangan Daerah. (2022,9 Desember). Laporan Relisasi Anggaran Keuangan Daerah dari: <https://karanganyarkab.bps.go.id/>
- Risetberbagi.Com. (2022). Kasus Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dari: <https://www.risetberbagi.com/baca/detil/426768/keuangan/pengelolaan-kekayaan-daerah-yang-dipisahkan-di-indonesia>